

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Negara-negara berkembang memiliki banyak masalah kependudukan, termasuk Indonesia yang memiliki permasalahan jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran tidak merata dan kualitas yang rendah. Dalam mengatasi masalah kependudukan, pemerintah perlu memiliki kebijakan-kebijakan tertentu. Peraturan pertumbuhan jumlah penduduk bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Permasalahan menjadi kompleks saat berkaitan antara satu masalah dan masalah lainnya, umumnya masih sangat banyak masyarakat yang kurang memahami penting program Keluarga Berencana Nasional. Jika dilihat secara lebih mendalam, permasalahan ini muncul ketika disuatu daerah penduduknya semakin banyak karena tingkat pendudukan yang semakin tinggi dan rendahnya kesadaran masyarakat akan Program KB, daerah tersebut akan mengalami sebuah kondisi di mana penduduk akan sangat padat, pada kondisi penduduk yang sangat padat dan juga tidak diimbangi dengan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan lapangan pekerjaan yang baik maka akan menimbulkan tingginya tingkat kemiskinan dan kehidupan masyarakat akan jauh dari sejahtera.

Jumlah penduduk yang terus bertambah kurang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mempengaruhi segi pembangunan dan kehidupan masyarakat. Sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan nasional. Penduduk adalah sasaran dan pelaku utama pembangunan. Penduduk maju adalah keadaan penduduk dengan kondisi perubahan yang lebih baik dari sekarang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Oleh karena itu hakekat pembangunan nasional adalah untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat.

Kebijakan pemerintah di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.8 tahun 1970, maka dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang disingkat BKKBN. Program Keluarga Berencana salah satunya pencegahan masalah

kependudukan, yang merupakan bagian yang terpadu untuk mencapai program pembangunan nasional dan bertujuan untuk turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, sosial dan budaya. Keluarga berencana pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran dan pembinaan ketahanan keluarga yang akan memberikan kontribusi meningkatnya kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing masing tingkatan perintah yaitu; sub urusan Pengendalian Penduduk, sub urusan Keluarga Berencana, sub urusan Keluarga Sejahtera, dan sub urusan Sertifikasi dan Standarisasi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB. Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan program-program pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai

dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung, karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju, apabila seluruh desa maju maka sudah tentu negarapun akan menjadi maju.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Lembaga Non Kementerian yang mendapat mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) Pemerintah periode 2015-2019, terutama pada Agenda Prioritas ke-3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam rangka Negara Kesatuan”, Agenda Prioritas ke-5 “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” serta Agenda Prioritas ke-8 “Revolusi Karakter Bangsa” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dalam upaya mewujudkan agenda prioritas tersebut, BKKBN harus dapat melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015- 2019 (pada Dimensi Pembangunan Nasional) dengan fokus penggarapan pada Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental) untuk diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada saat ini sudah mulai menurun dan gaungnya tidak terdengar seperti dulu lagi, sehingga harus direvitalisasi kembali serta diadakan gerakan-gerakan untuk kembali menggalakkan program KKBPK tersebut. Lini lapangan (below the line) menjadi tema sentral pembangunan program Kependudukan, Keluarga berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sejak 2010-an. Sejumlah kegiatan monumental digulirkan. Pada saat yang sama, kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di galakkan. Kampung KB termasuk salah satu terobosan yang didesain khusus untuk menggerakkan program KKBPK di tingkat dusun alias kampung.

Kampung KB ini mencoba memadukan konsep pembangunan terpadu bidang kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK). Kampung KB merupakan salah satu upaya menjadikan program KKB-PK sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada

masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas.

Secara umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus ditunjang oleh banyak pendukung. Diantaranya adalah, pengelola kampung KB yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat berpengaruh pada berlangsungnya proses pendidikan. Oleh karenanya diperlukan pengelola yang profesional, sebagai pemenuhan sumber daya manusia yang baik. Namun perlu dipahami, dalam menjadi seorang pemimpin yang berkualitas dan profesional bukanlah suatu tugas yang ringan, karena hal itu memerlukan adanya keseriusan, kerja keras, keikhlasan dalam bekerja dan bekerja sama dengan pihak terkait.

Ditemukan fakta dilapangan bahwa pengelola yang ada di kampung KB Insan Sejahtera memiliki tipe kepemimpinan kolektif yang dimana disetiap program 8 fungsi keluarga memiliki pemimpin yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama serta dalam manajemen programnya tidak ada program yang berbenturan satu sama lain. Program-program yang sudah dibuat oleh tiap-tiap bidang tidak terlalu banyak kendala untuk dilaksanakan. Berdasarkan fakta tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan proses strategi kepemimpinan pengelola Kampung KB yang berjudul “Strategi Kepemimpinan Kolektif dalam Pengelolaan Kampung KB Insan Sejahtera”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan, yaitu:

1. Berdasarkan kondisi empirik di lapangan keberadaan Kampung KB Insan Sejahtera telah mampu menaikkan angka akseptor KB tipe alat kontrasepsi jangka panjang sebanyak 4 kali lipat, tehitung sejak tahun 2016 hingga 2019
2. Berdasarkan kondisi empirik yang ada di lapangan keberadaan kampung KB Insan Sejahtera telah mampu menurunkan angka pernikahan dibawah umur sesuai dengan data pada tahun 2018 rata-rata usia pernikahan ada pada usia 18,7 tahun
3. Berdasarkan kondisi empirik di lapangan kampung KB Insan Sejahtera telah melaksanakan seluruh program yang mengacu pada 8 fungsi keluarga pada

tahun 2018 yang diantaranya program agama, lingkungan, seni budaya, perlindungan ekonomi, cinta kasih, reproduksi dan pendidikan.

4. Kerhasilan setiap kegiatan program Kampung KB didukung oleh peranan masyarakat yang memiliki partisipasi tinggi dalam setiap penyelenggaraan program, ditunjukkan dengan kehadiran masyarakat yang menjadi sasaran program sebanyak 80%
5. Dalam mensukseskan program kampung KB Insan Sejahtera ada peran penting dari pengelola kampung KB, dalam pengelolaannya kampung KB Insan Sejahtera memiliki program-program yang berasal dari 8 fungsi keluarga, diantara semua program masing-masing memiliki pemimpin yang menaungi programnya.

Berdasarkan identifikasi yang telah dipaparkan sebelumnya peneliti menjabarkan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan program di kampung KB Insan Sejahtera Desa Sukajaya?
2. Bagaimana gambaran keberhasilan program di kampung KB Insan Sejahtera Desa Sukajaya?
3. Bagaimana strategi kepemimpinan kolektif untuk pencapaian keberhasilan program di kampung KB Insan Sejahtera?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan pengelolaan program di Kampung KB Insan Sejahtera Desa Sukajaya
2. Mendeskripsikan gambaran keberhasilan program di kampung KB Insan Sejahtera Desa Sukajaya
3. Mendeskripsikan bagaimana proses kepemimpinan kolektif di kampung KB Insan Sejahtera

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipercaya dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Semua hasil

yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan program kampung KB dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengembang ilmu pengetahuan serta menjadi bahan pembandingan antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai pengimplementasian terhadap penelitian mengenai strategi kepemimpinan kolektif dalam pengelolaan program di Kampung KB Insan Sejahtera
  - b. Bagi Kampung KB Insan Sejahtera, memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat di bidang kepemimpinan kolektif dalam pengelolaan program
  - c. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu rujukan informasi dan sebagai data dasar untuk meneliti masalah mengenai kepemimpinan kolektif
3. Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial

Memberikan informasi kepada semua pihak mengenai strategi kepemimpinan kolektif dalam pengelolaan kampung KB, sebagai bahan acuan untuk organisasi atau lembaga-lembaga lain dalam mengenal kepemimpinan kolektif dalam suatu pengelolaan program.

### **1.5. Struktur Organisasi Skripsi**

Sistematika penulisan pada penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI Tahun 2018, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN** : Latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat bagi penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** : Berisikan tentang konsep-konsep dan teori-teori yang mendukung terhadap permasalahan yang diajukan, penelitian terdahulu dan posisi teoritis peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN : Alur penelitian, dimulai dari desain penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, tahap mengolah data dan proses menganalisis data.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN : Pemaparan tentang hasil temuan penelitian serta pembahasan hasil temuan penelitian. Pembahasan pada bab adalah kesimpulan hasil dari temuan yang diselaraskan dengan teori pendukung.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI : Simpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.